



Relokasi

# IBUKOTA NEGARA

(STUDI ALTERNATIF)



---

Muhadam Labolo  
Ahmad Averus Toana

---

## Biografi Penulis



Muhadam Labolo, lahir di Pagimana Kabupaten Banggai Sulteng, 5 Agustus 1972. Dosen tetap pasca sarjana IPDN Jakarta. Lulusan STPDN tahun 1995, S1 Institut Ilmu Pemerintahan, S2-S3 Universitas Padjadjaran Bandung. Selain mengajar di almamaternya (Diploma, S1, Profesi, S2,S3), lebih dari seribu kali menjadi pembicara dihadapan DPRD dari Sabang sampai Merauke sejak tahun 2002. Pernah menjadi Lurah Teladan di Sulawesi Selatan, Mahasiswa Teladan di IIP, serta Dosen Favorit di almamaternya. Menulis artikel diberbagai media sosial, memiliki lebih dari 20 buku dan 200 tulisan di blog perpektif pemerintahan. Melakukan studi banding di Asia dan Eropa. Pernah menjadi Pemred Jurnal Widyapraja, Kapus, Wakil Dekan, dan Dekan Fakultas Politik Pemerintahan (2018-2020). Ketua Asosiasi Dosen IPDN, Anggota MIPI dan AIPI, serta Ketua Paguyuban Angkatan Kosong Empat Indonesia (PAS0P4TI).



Ahmad Avenus Toana, lahir di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 4 Maret 1979. Dosen tetap di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Pernah sebagai Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan pada Program Profesi Kepamongpraajaan, saat ini menjabat Sekretaris Program Doktor. Pernah menjadi Tenaga Ahli BPKK DPD RI dan Sekjen DPD RI. Pernah mengajar di Universitas Muhammadiyah Palu dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Palu. Pengalaman praktisi sebagai Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan, lalu Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi di BAPPEDA. Mendapat gelar Sarjana Sains Terapan Pemerintahan dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Padjadjaran, dan Doktor Ilmu Administrasi dari Universitas Padjadjaran. Salah satu deklarator Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI), anggota Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), dan anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI).



0858 5343 1992  
eurekamediaaksara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-6251-38-4



**RELOKASI IBUKOTA NEGARA**  
**(Studi Alternatif)**

**MUHADAM LABOLO**  
**AHMAD AVERUS TOANA**



**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**



**RELOKASI IBUKOTA NEGARA  
(Studi Alternatif)**

**Penulis** : Muhadam Labolo  
Ahmad Averus Toana

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Siwi Rimayani Oktora

**ISBN** : 978-623-5251-39-4

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2022**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku sederhana dengan judul **Relokasi Pusat Ibukota Negara (Studi Alternatif)**. Pemilihan judul ini mempertimbangkan sejumlah hal yaitu, *pertama* memperhatikan urgensi kebutuhan pusat ibukota negara sebagai konsekuensi relokasi. *Kedua*, memperhatikan berbagai faktor yang dimiliki wilayah yang dianggap layak maupun tidak menjadi pusat ibukota pemerintahan. *Ketiga*, pemilihan lokus kajian di sejumlah wilayah berkaitan dengan isu alternatif pusat ibukota pemerintahan yang direncanakan sejak Presiden Republik Indonesia pertama Ir. Soekarno.

Disisi lain pemilihan lokus kajian awal terhadap sejumlah wilayah merupakan pengembangan dari buah pikiran yang dipublikasikan Tim Visi 2033. Pemikiran tersebut menitikberatkan pada Provinsi Kalimantan Selatan sebagai alternatif pusat ibukota pemerintahan. Kajian ini bukanlah dalam maksud mendebatkan letak pusat ibukota pemerintahan, namun kajian ini ingin memperlihatkan berbagai alternatif pusat ibukota pemerintahan. Dengan berbagai pilihan alternatif itu kita dapat membandingkan dalam penentuan pusat ibukota pemerintahan. Tulisan ini sekalipun berpaut 10 tahun lalu, dengan data lampau, terbatas bahkan terlambat, setidaknya dapat memberikan alternatif pembandingan dalam memahami upaya pemerintah merelokasi Ibukota Negara.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada saudara Ahmad Oktabri Widyananda yang telah bersedia meluangkan waktu untuk turut bersama dalam kajian singkat ini. Disamping itu kami menyadari sepenuhnya keterbatasan waktu, biaya dan sumber daya sehingga kajian sederhana ini hanya dilakukan terbatas pada daerah tertentu saja. Tentu perlu dilakukan kajian lebih mendalam pada daerah lain sebagai alternatif pengembangan tidak saja sebagai ibukota negara, juga pengembangan kawasan strategis dimasa akan datang. Demikian, terima kasih.

Jakarta, Januari 2022

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>PROLOG</b> .....	1
<b>BAB 1 LATAR BELAKANG</b> .....	12
<b>BAB 2 DIMENSI TEORITIK &amp; PRAGMATIS</b> .....	16
A. Dimensi Teoritik Pengembangan Wilayah dan Pusat Pemerintahan.....	16
1. Dimensi Administrasi.....	16
2. Dimensi Ekonomi.....	17
3. Dimensi Politik.....	19
4. Dimensi Geografis .....	20
5. Dimensi Sosial Budaya .....	22
6. Dimensi Demografis.....	23
7. Dimensi Sejarah.....	24
8. Dimensi Demokrasi .....	25
B. Beberapa Variabel Pragmatis Pemicu Relokasi Pusat Pemerintahan.....	26
1. Pemerintah Versus <i>Civil Society</i> .....	26
2. Dimensi Politik Pemerintah Versus Politik Lokal...27	
3. Dimensi Efisiensi Organisasi Pemerintah Pusat .....	27
4. Dimensi Penguatan Etnik Lokal dan Pengakuan Sistem Nilai.....	28
5. Dimensi Diskriminasi Kebijakan .....	28
6. Dimensi Span of Control .....	29
7. Dimensi Pengelolaan Konflik .....	30
8. Dimensi Pengaruh Kompetensi Globalisasi .....	30
9. Dimensi Strategi <i>Big Birokrasi</i> .....	31
C. Catatan Tim Visi Indonesia 2033 .....	31
D. Kerangka Pemikiran .....	33
<b>BAB 3 PENDEKATAN</b> .....	39
<b>BAB 4 GAMBARAN UMUM DAN DIALEKTIKA</b> .....	47
A. Selayang Pandang Kota Palangka Raya.....	47
B. Faktor-Faktor Kelayakan.....	52

1. Faktor Administrasi .....	52
2. Faktor Ekonomi .....	55
3. Faktor Politik.....	61
4. Faktor Geografis .....	67
5. Faktor Sosial Budaya.....	69
6. Faktor Demografis.....	83
7. Faktor Sejarah .....	97
8. Faktor Demokrasi .....	106
<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	121
A. Kesimpulan .....	121
B. Rekomendasi.....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	124
<b>TENTANG PENULIS</b> .....	127

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4. 1</b> Jumlah Perusahaan yang Bergerak di Bidang Industri Pertanian, Kehutanan, Industri Logam Mesin dan Kimia .....	59
<b>Tabel 4. 2</b> Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Perusahaan Di Bidang Industri Pertanian Dan Kehutanan Maupun Yang Bergerak Di Bidang Industri Logam Mesin dan Kimia .....	59
<b>Tabel 4. 3</b> Fungsi Kawasan dan Luas Kawasan dalam Draf RTRW Kota Palangka Raya 2009 – 2029 .....	68
<b>Tabel 4. 4</b> Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Jenis Sekolah....	80
<b>Tabel 4. 5</b> Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin .....	81
<b>Tabel 4. 6</b> Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan.....	87
<b>Tabel 4. 7</b> Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010- 2011 .....	88
<b>Tabel 4. 8</b> Persebaran Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2010 Sampai Dengan Tahun 2011 .....	90
<b>Tabel 4. 9</b> Sex Ratio Penduduk Kalimantan Tengah.....	94
<b>Tabel 4. 10</b> Persentase Penduduk Berdasarkan Usia Muda, Produktif dan Usia Tua.....	96
<b>Tabel 4. 11</b> Jumlah Pemilih Menurut Organisasi Sosial Politik Hasil Pemilu 2009 Untuk Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.....	114



## PROLOG



Perdebatan status ibukota negara kini memasuki tahap baru pasca ditetapkan sebagai *beleid* ibukota negara. Isu atas sejumlah teks berubah menjadi batasan dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Misalnya saja otorita, bukan daerah administratif. Dalam hal ini, Ibukota bukan semata relokasi episentrum pemerintahan, juga negara. Dalam sejumlah kasus diberberapa negara, pusat pemerintahan berubah namun Ibukota Negara tetap. Kota Sejong menghabiskan 289 triliun saat relokasi hanya menggeser pusat pemerintahan, Seoul tetap Ibukota Negara Korea Selatan. Putrajaya yang menghabiskan 117 triliun sebagai pusat pemerintahan, tetap saja menempatkan Kualalumpur sebagai Ibukota Negara Malaysia (Berawi, 2022). Dari sisi waktu, India membutuhkan 12 tahun membangun New Delhi, sedangkan Australia membutuhkan 20 tahun menyelesaikan Canberra. Bandingkan dengan persiapan rencana relokasi Ibukota Negara sekaligus pusat pemerintahan Indonesia yang mencapai kurang lebih 466 triliun dengan estimasi waktu yang belum jelas (Bappenas, 2022). Terhadap sejumlah pertanyaan apakah Ibukota Negara dapat berakhir sebagai kota hantu alias kota yang tak sukses berkembang. Hal ini mungkin tak dapat digeneralisasi sebagaimana Den Haag sebagai pusat pemerintahan Belanda. Demikian sepinya bahkan disebut desa terbesar di Eropa.

Status Ibukota Negara dalam kebijakan ini bersifat otorita. Otorita dalam konteks itu bersifat spesial dan sentralistik. Spesial, berisi wewenang pemerintah dalam mengatur ibukota negara. Kewenangan spesialis itu bahkan mengecualikan semua ketentuan yang mengatur sentral pemerintahan, termasuk undang-undang pemerintahan daerah. Pejabatnya *top down* yang ditunjuk sesuai kebutuhan. Semua kriteria bergantung *prerogatif* pemerintah sesuai aturan teknis oleh presiden. Dalam kaitan itu tak ada arus *bottom up* berbasis komunitas, apalagi otonomi. Semua serba koordinatif dan

# BAB

# 1

## LATAR BELAKANG

Gagasan relokasi ibukota negara yang dikemukakan Tim Visi Indonesia 2033 tampaknya menjumpai waktunya lewat berbagai dialektika. Dengan titik berat geografis pada wilayah Kalimantan, Visi Indonesia 2033 memberi enam alasan pokok yaitu, *pertama*, secara geografis Kalimantan berada di wilayah tengah Indonesia yang memungkinkan mobilisasi demografi dari wilayah Jawa lebih rendah. *Kedua*, dari sisi ekonomi Kalimantan memiliki sumber daya yang mencukupi dalam hal pertambangan dan energi. *Ketiga*, sumber daya air yang menjadi prasyarat vital sangat memungkinkan tersedia dengan baik sepanjang komitmen pemerintah dalam pengendalian lingkungan hidup dilakukan secara konsisten. *Keempat*, secara demografis Kalimantan merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah selain Papua. *Kelima*, Kalimantan merupakan daerah yang paling rendah diterpa resiko bencana. *Keenam*, secara keadilan ekonomi, Kalimantan adalah daerah dengan pertumbuhan dan sirkulasi modal yang dinilai kurang adil dan tak seimbang di Indonesia. Keenam variabel di atas tampaknya menjadi landasan analisis Tim Visi Indonesia 2033 yang memungkinkan Kalimantan dipilih sebagai alternatif ibukota negara.

Jika pulau Kalimantan memiliki semacam daya tarik keterpilihan ibukota alternatif (*key drivers*), maka pada sisi lain Jakarta kini memiliki daya tolak yang tinggi sebagai ibukota negara (*underlying causes*). Secara empirik perkembangan yang pesat

# BAB 2

## DIMENSI TEORITIK & PRAGMATIS

### A. Dimensi Teoritik Pengembangan Wilayah dan Pusat Pemerintahan

#### 1. Dimensi Administrasi

Kebutuhan pengembangan wilayah dan pusat pemerintahan (Ibukota Negara) dari perspektif administrasi dimaksudkan untuk membangun hubungan antar wilayah pelayanan melalui organisasi pelaksana di wilayah kerja. Pengorganisasian wilayah didasarkan pada aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu wilayah sehingga memerlukan area kerja tersendiri (*special space*). Wilayah yang diberi status khusus diyakini dapat meningkatkan pelayanan administrasi pada masyarakat karena pengembangan wilayah dengan sendirinya dapat memberikan peluang. Penyesuaian administrasi dan pelayanan terhadap karakteristik wilayah yang bervariasi dalam banyak kasus merupakan konsekuensi atas perbedaan yang dibentuk secara geografis. Secara fisual dimensi administrasi berkaitan erat dengan dimensi geografis. Dalam hal ini geografi menjadi dasar penentuan batas-batas administrasi. Suatu wilayah geografis dengan wilayah yang relatif kecil adalah area yang tepat untuk tujuan *pertama*, pelayanan lebih optimal, karena wilayah pelayanan relatif sempit. *Kedua*, pemerintahan lebih responsif karena lebih dekat dengan komunitas yang dilayani. *Ketiga*, partisipasi masyarakat lebih meluas karena akses masyarakat relatif terbuka. *Keempat*, konsolidasi masyarakat menjadi lebih mudah karena kedekatan institusi dengan masyarakat.

# BAB

# 3

# PENDEKATAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Kajian berupaya memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang menentukan suatu wilayah dapat dijadikan sebagai pusat ibukota pemerintahan. Selain itu kajian ini melihat seberapa besar kemauan pemerintah dan respon masyarakat terhadap status ibukota pemerintahan ketika dipindahkan ke wilayah Kalimantan. Prosedur pemecahan masalah dilihat dari faktor-faktor pendukung dan respon pemerintah setempat sebagai sinyal yang kuat bagi alternatif relokasi pusat ibukota pemerintahan. Artinya semua informasi yang diterima saat turun ke daerah yang menjadi alternatif pusat pemerintahan digambarkan sebagaimana pandangan subjek yang bersangkutan (Nawawi, 1995:63).

Pertimbangan menggunakan pendekatan kualitatif dalam kajian ini untuk memahami dan memfokuskan pada penggalian faktor-faktor pendukung kelayakan dan upaya pemerintah dalam mempersiapkan wilayah setempat serta fakta sosial yang menjadi alternatif pusat pemerintahan. Kajian deskriptif bertujuan menggambarkan secara presisi faktor-faktor yang mendukung kelayakan serta kesiapan pemerintah dan masyarakat yang menjadi wilayah alternatif pemindahan pusat pemerintahan.

Kajian dilakukan dengan memasuki wilayah yang dijadikan lokasi untuk melihat langsung kondisi daerah dan masyarakat, selanjutnya dilakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan para pejabat formal sehingga terdapat gambaran mengenai

# BAB 4

## GAMBARAN UMUM DAN DIALEKTIKA

### A. Selayang Pandang Kota Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah terbentuk pada tanggal 23 Mei 1957, yang dikuatkan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Peresmian sekaligus pencaanangan Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan Presiden Republik Indonesia pertama Ir. Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957. Peristiwa itu ditandai peresmian Monumen Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna pada angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian pula pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang, sedangkan Tugu Api berarti api tak kunjung padam yang juga berarti semangat kemerdekaan dan membangun. Adapun bentuk monumen segi lima melambangkan Pancasila dengan lima sila yang terdiri atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 ibukota Provinsi yang sebelum bernama Pahandut kemudian berganti nama menjadi Palangka Raya.

Sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah tentunya Kota Palangka Raya memiliki pemerintahan yang secara khusus

# BAB 5

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kajian ini secara umum menunjukkan bahwa relokasi pusat pemerintahan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan pertimbangan terhadap sejumlah faktor yaitu administrasi, ekonomi, politik, geografi, sosial budaya, demografi, sejarah dan demokratisasi sebagai faktor yang dapat dijadikan standar kelayakan relokasi pusat pemerintahan.

Secara khusus faktor administrasi mendukung upaya mempercepat pelayanan yang efisien dan efektif di pusat alternatif pemerintahan. Faktor ekonomi mendukung upaya percepatan tumbuhnya sentra ekonomi diberbagai sudut perkotaan. Faktor politik mendukung upaya terciptanya stabilitas politik lokal yang mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat kota. Faktor geografis mendorong *positioning* Kota Palangka Raya menjadi lebih mudah dijangkau oleh daerah baik dari timur, barat dan selatan Indonesia. Faktor sosial budaya mendukung terciptanya harmonisasi dan sistem sosial yang relatif menjamin keterbukaan bagi masyarakat luar. Faktor demografi mendukung upaya untuk melakukan mobilisasi oleh karena terdapat kesenjangan yang lebar antara luas wilayah dan jumlah penduduk. Faktor sejarah menjadi modal bagi Kota Palangka Raya dalam mengembangkan wilayah menjadi pusat pemerintahan. Faktor demokratisasi menunjukkan bahwa masyarakat Kota Palangka Raya baik secara nilai, institusi, partisipasi dan sistem politik relatif mampu menggambarkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Chaniago, Andrinof A., dkk, *Visi Indonesia 2033; Pemindahan Ibukota Ke Kalimantan Lorong Keluar Dari Berbagai Paradoks Pembangunan, Menuju Indonesia Yang Tertata*. Tim Visi Indonesia 2033.
- Cheema & Rondenelli, 1983, *Decentralization and Development*, California : Sage Publications, Beverly Hills.
- Dahl, Robert, 1982. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1985. *Dilema Demokrasi Pluralis*, Jakarta : Rajawali Press.
- Dimock, Marshal Edward, Gladis Ogden Dimock, dan Douglas M. Fox, 1983, *Administrasi Negara*, Jakarta : Erlangga.
- Djohan, Djohermansyah, 2003, *Kebijakan Otonomi Daerah 1999*, Jakarta : Yarsif Watampone.
- Dwiyanto, Agus dkk, 2004, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jogjakarta : PSKK Gajah Mada.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Kajian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang : Yayasan Asih Asah Asuh (YA3).
- Hidayat, 2007, *To Much and Too Soon, Persepsi Elite Terhadap Terhadap Desentralisasi*, Jakarta : Grafindo.
- Hermantyo, Djoko, *Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah dan Pola Perkembangan Wilayah Di Indonesia*, disampaikan dalam Seminar Nasional dan PIT - IGI tanggal 21-23 Oktober 2011 di Bali.
- <http://id.wikipedia.org>.
- Kaho, J. Riwu, 1981, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta : Bina Aksara.



- \_\_\_\_\_, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T., 1991, *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Koran Republika, Edisi Senin 21 Januari 2013.
- Koswara, E, 2000, *Teori Pemerintahan Daerah*, Jakarta : IIP Press.
- Kuncoro, Mudrajad, 2002, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta : Erlangga.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH UIL, Jogjakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Hubungan Pusat - Daerah Dalam Pembangunan*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Kajian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Nasution, 1992. *Metode Kajian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Nawawi, H., Hadari.1995. *Metode Kajian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu, 2007, *Fragmentasi Indonesia, Bahan Scientific Traffic*, Jakarta : IIP.
- Proceeding Seminar dengan tema “Jakarta Kota Multikultural Yang Melayani Warga”, Diselenggarakan oleh Akademi Jakarta, LIPI dan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
- Selayang Pandang Kota Palangka Raya Tahun 2012.
- Subagyo, Untung, 2006, *Gagasan Pembentukan Satu Tingkatan Daerah Otonom*, bahan Scientific Traffic, Jakarta : IIP.

Smith, B.C., 1985, Decentralization: The Territorial Dimension Of  
The State, Winchester Massachussets : Allen & Unwin, Inc

Suprayogo, Cahyo, 2004, Efektivitas Daerah Pemekaran di  
Indonesia, Jakarta : IIP Press.

Palangka Raya Dalam Angka tahun 2012.

## TENTANG PENULIS



**Muhadam Labolo**, Lahir di Pagimana Kabupaten Banggai Sulteng, 5 Agustus 1972. Dosen tetap pasca sarjana IPDN Jakarta. Lulusan STPDN tahun 1995, S1 Institut Ilmu Pemerintahan, S2-S3 Universitas Padjadjaran Bandung. Selain mengajar di almamaternya (Diploma, S1, Profesi, S2,S3), lebih dari seribu kali menjadi pembicara dihadapan DPRD dari Sabang sampai Merauke sejak tahun 2002. Pernah menjadi Lurah Teladan di Sulawesi Selatan, Mahasiswa Teladan di IIP, serta Dosen Favorit di almamaternya. Menulis artikel diberbagai media sosial, memiliki lebih dari 20 buku dan 200 tulisan di blog perpektif pemerintahan. Melakukan studi banding di Asia dan Eropa. Pernah menjadi Pemred Jurnal Widyapraja, Kapus, Wakil Dekan, dan Dekan Fakultas Politik Pemerintahan (2018-2020). Ketua Asosiasi Dosen IPDN, Anggota MIPI dan AIPI, serta Ketua Paguyuban Angkatan Kosong Empat Indonesia (PASOP4TI).



**Ahmad Averus Toana**, lahir di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 4 Maret 1979. Dosen tetap di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Pernah sebagai Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan pada Program Profesi Kepamongprajaan, saat ini menjabat Sekretaris Program Doktor. Pernah menjadi Tenaga Ahli BPKK DPD RI dan Sekjen DPD RI.

Pernah mengajar di Universitas Muhammadiyah Palu dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Palu. Pengalaman praktisi sebagai Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan, lalu Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi di BAPPEDA. Mendapat

gelar Sarjana Sains Terapan Pemerintahan dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Padjadjaran, dan Doktor Ilmu Administrasi dari Universitas Padjadjaran. Salah satu deklaratör Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI), anggota Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), dan anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI).